

Hukum Pajak Era Klasik



Heri Priyatmoko
Dosen Sejarah,
Universitas Sanata Dharma

Presiden Joko Widodo *ngasak!* Itulah penilaian terhadap mantan juragan mebel ini terkait pelaksanaan *tax amnesty*. Program itu dijalankan demi mengejar target pendapatan sebesar Rp 1.786,2 triliun dengan porsi penerimaan pajak sebesar Rp 1.347,78 triliun. Dalam APBN-P 2016, pemerintah kadung mematok pemasukan dari PPh sebesar Rp 855,84 triliun, PPN Rp 474,23 triliun, dan PBB Rp 17,71 triliun. Kenyataannya, target belanja negara baru mencapai Rp 2.082,95 triliun.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak dike-tok palu menjadi undang-undang (UU), maka lembaga plat merah memiliki instrumen fiskal tambahan guna menutup target penerimaan negara yang telah ditetapkan. Pengesahan regulasi ini menunjukkan pemerintah telah memiliki payung hukum untuk memberi pengampunan kepada orang atau badan yang selama ini absen membayar pajak sesuai dengan harta yang dipunya.

Soal hukum dalam jagad pajak, sebetulnya telah dipikirkan sejak zaman kerajaan. Kakek moyang kita mewariskan pemahaman dan perangkat hukum yang apik, sebelum kemudian dihapus oleh institusi Mataram Islam dan Kolonial Belanda dengan menciptakan norma hukum sendiri.

Pakar arkeologi termasyur, Boechari (1975), telah mengumpulkan banyak prasasti yang memuat

Optik sejarah menunjukkan bahwa leluhur kita hidup di era kuno tapi Mereka telah menciptakan dan menggunakan perangkat hukum secara lincah guna mengatur warga.

masalah pelanggaran hukum yang terjadi pada pertengahan abad IX-XIV. Dari isi prasasti, terdapat masalah pajak tanah, sengketa hak waris tanah, kewarganegaraan yang bertembak dengan kewajiban membayar pajak, dan utang-piutang. Dimuat pula keterangan prosedur penyelesaian sengketa. Misalnya, mengirim surat panggilan lebih dulu ke pihak yang berkonflik. Prasasti era Majapahit (Bendosari dan Parung) menulis, permasalahan hendaknya dirampungkan mengikuti aturan kitab hukum, pendapat umum (adat), kasus serupa yang terjadi sebelumnya, isi kitab *Kutaramanawa*, serta kebiasaan pejabat kehakiman yang ahli.

orang (*wang kabeh mageng admit salu-irnya*), lantas diikuti rinciannya dari *caturasrama* (*bramacari, grhastha, wanaprastha, bhiksuka*), *caturwarna* (Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra), pejabat desa (*apinghay, akurug*) dan raja berikut *mantri* (Riboet Darmosetopo, 1997).

Di samping itu, ada pelanggaran lain yang disebut *sukhaduhka* (senang-susah) atau *halahayu* (buruk dan baik). Nama pelanggaran biasanya dihubungkan dengan aksi kriminal. Kendati kitab aturan hukum dinyatakan secara jelas di era Majapahit, namun tidak berarti periode itu dilakukan kodifikasi. Dalam konteks ini, perlu disimak sumber berita Cina yang

Adigama, *Swarajambhu, Canakya, Kamandaka, Kertopapati, Dharmmopapati, Dustakalabaya, Dewadancila, Purwadigama dan Sarasamuchaya*. Mengenai siapa yang menjalankan fungsi penegakan hukum, diduga para pejabat yang menyandang gelar *samget* yang sudah ada sejak era Singhasari. Nama jabatan ini dikenal dengan sebutan *Dharmmadhyaksa* (*kasaiwan dan kasogatan*) yang dibantu sejumlah pejabat lain dengan gelar *samget*.

Kutuk

Ternyata, leluhur orang Indonesia juga mengurus ihwal kutukan. Kutuk dan denda adalah bentuk sanksi yang dikenakan. Kutuk di-

hangus terbakar.

Malapetaka bakal menimpa ditegaskan dengan bunyi kutukan: "Jika pergi ke hutan akan dimakan ular berbisa, bila pergi ke ladang bakal disambar petir sekalipun musim kemarau, kalau pergi ke bendungan akan tenggelam disahut buaya". Sebagai penutup, diucapkan kepada para pelanggar supaya diberi kemalangan besar (*pancamahapataka*) sekian waktu. Sanksi denda dinyatakan dalam bentuk emas. Jumlah terkecil yang pernah disebutkan adalah *ma satu ka lima su* (sekitar 592,51 gram) seperti yang tertuang dalam prasasti Patakan, dan terbesar *ma lima ka satu su* (sekitar 3812,90 gram) tertera dalam prasasti Panggumulan (926 M).

Merujuk temuan Edi Sedyawati (1994), prasasti sebelum abad XII hanya menyebutkan kutukan sebagai sanksi. Sedikit menyebutkan denda, namun memasuki abad VII di era Kadiri, sanksi berupa denda menjadi kelaziman. Ditinjau dari sudut pengawasan, periode Kadiri terjadi perubahan orientasi dari sanksi yang semula menekankan kepada penindakan akan efek kutukan yang bersifat magis ke bentuk baru, yakni denda emas dalam satuan *kati* dan *suwarna*. Hal ini bisa dinilai sebagai bentuk pengawasan ketat ketimbang sekadar kutukan yang mengandalkan kesadaran.

Demikianlah, optik sejarah menunjukkan bahwa leluhur kita hidup di era kuno tapi Mereka telah menciptakan dan menggunakan perangkat hukum secara lincah guna mengatur warga. Presiden Jokowi mengeluarkan cara jitu di jalur pajak bukanlah hal baru dalam sejarah Nusantara. Pemerintah mestinya juga menyuntik kesadaran wajib pajak secara luas dengan mengimbangi pembenahan sistem dan administrasi perpajakan sebagai salah satu agenda utama. ■



Dari realitas di atas, terselip tiga hal pokok dari penerapan sistem hukum, yakni aneka kitab hukum tertulis yang bersifat "nasional" telah ada, hukum adat masih dijadikan sumber aturan tambahan, dan pengetahuan perhal hukum formal sudah dikenal penduduk kala itu.

Terdapat juga tata aturan terhadap *sima* (daerah yang diistimewakan oleh kerajaan). Aneka jenis pelanggaran tidak dirinci, hanya beberapa istilah lazim dipakai dalam saban prasasti, yaitu *umulahul* atau *ulahulul*, *langgana*, *mungkil-mungkil* dan *angraddha*. Sejumlah prasasti menyebut, *sima* tidak boleh diganggu semua

memuat tentang Jawa abad XII-XIII. Sumber itu bilang, jika orang bersalah didenda dengan sejumlah emas, sedang kalau merampok atau mencuri dihukum mati. Keterangan ini menyediakan petunjuk bahwa awal kodifikasi hukum telah dimulai sedari era Kadiri. Pentingnya aturan hukum bukan semata-mata dilihat dari aspek administrasinya, tapi juga dalam aspek lain yang menyangkut pengelolaan ekonomi dan pengendalian keamanan.

Kaum intelektual bidang hukum cukup produktif, hal itu terbukti dari jumlah naskah hukum yang diterbitkan. Antara lain, *Kutaramanawa*, *Dewagama*,

bacakan pemimpin upacara (*sang akudur*) sembari memperlihatkan tindakan simbolik dengan memotong leher ayam di atas landasan *watu kalumpang* dan membanting telur di atas *watu sima* serta terkadang menaburkan abu. Efek simbolik yang diharapkan ialah pelanggaran akan bernasib malang bak ayam yang dipisahkan antara badan dan kepalanya, hancur lebur laiknya pecahan telur, dan kayu yang jadi abu lantaran

Redaksi menerima tulisan opini, ditempatkan jema lokal Surakarta dan sekitarnya. Tulisan merupakan asli karya sendiri dan belum atau tidak dikirimkan ke media lain. Ketik sepanjang 6.000 karakter with spaces dan kirim via email ke: opini.joglosemar@gmail.com. Lengkap identitas diri, foto dalam pose santai, nomor rekening dan nomor telepon. Jika dalam waktu dua pekan tulisan belum dimuat, otomatis penulis berhak mencabut tulisan tersebut.